

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta kemampuan yang professional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Diputuskannya kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah sebagaimana dimuat dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah pada era otonomi daerah. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang mandiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tercapainya pembangunan daerah tahunan.

Permasalahan dalam mengimplementasikan manajemen keuangan daerah diantaranya adalah sistem penganggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incremental*. *Line item* merupakan ciri dari anggaran tradisional yang didasarkan atas dasar sifat (*nature*) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluaran

yang telah ada dalam struktur anggaran. Karena sifat tersebut, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.<sup>1</sup>

Metode *incremental* menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahunan sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan ini belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, namun dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mengerti pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini, telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar atau belum. Sehingga kedua metode penganggaran tradisional itu kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.<sup>2</sup>

Pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, pemerintah provinsi memainkan peran ganda dalam sistem pemerintahan di era otonomi dimana di satu pihak provinsi merupakan daerah otonom yang dapat menjelaskan tugas dalam konteks desentralisasi. Selain itu, provinsi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjalankan wewenang yang bersifat dekonsentrasi.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.02/2006, kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

---

<sup>1</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang: UMM Press, 2004), p.127

<sup>2</sup> *Ibid.*, p.126

dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan potensi pendapatan asli daerah dengan potensi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil SDA yang diterima oleh daerah.

Peta kapasitas fiskal dikelompokkan menjadi empat, yaitu daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin kuat kemampuan keuangan daerah tersebut.

Penghitungan indeks kapasitas fiskal daerah provinsi dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah provinsi. Menurut Permenkeu No 174/PMK.07/2009 Tentang Peta Kapasitas Daerah, penghitungan kapasitas fiskal sebagai berikut: 
$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{[(\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Lain2 Pendapatan yang sah}) - \text{Belanja Pegawai}]}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$
 Kapasitas fiskal di Pulau Jawa yang paling rendah adalah di Jawa Tengah. Data kapasitas fiskal tahun 2011 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Peta Kapasitas Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tahun 2011**

<b>No.</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Index Kapasitas Fiskal</b>	<b>Kategori</b>
1	Provinsi DKI Jakarta	6.8725	Sangat tinggi
2	Provinsi Banten	0.6299	Sedang
3	Provinsi DI Yogyakarta	0.3632	Rendah
4	Provinsi Jawa Barat	0.3229	Rendah
5	Provinsi Jawa Timur	0.2204	Rendah
6	Provinsi Jawa Tengah	0.1958	Rendah

Sumber: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah/ <http://djkd.depdagri.go.id>

Peta seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011 yang paling rendah adalah Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya kapasitas fiskal ini, akan mengindikasikan terjadinya tingkat kemandirian yang rendah. Hal tersebut terlihat dari tabel di atas. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupate/Kota dengan luas wilayah sebesar 32.800,69 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 32.380.687 jiwa. Menurut data dari ditjen keuangan daerah, dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah masih memiliki kategori rendah pada kapasitas fiskalnya. Hanya Kota Salatiga yang mempunyai kategori tinggi. Sedangkan yang memiliki kategori sedang ada 5, yaitu Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Tegal dan sisanya masih berada pada kategori rendah.

Kinerja keuangan Jawa Tengah sampai dengan triwulan III-2011 belum menunjukkan kinerja yang optimal. Capaian realisasi pendapatan yang melebihi targetnya tidak diikuti oleh realisasi belanja. Sampai dengan triwulan III-2011 realisasi pendapatan sudah mencapai 79,30% dari APBD tahun 2011. Sementara itu raelisasi belanja daerah baru mencapai 50,95%, lebih rendah dibanding

triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 62,36%. Disamping itu, realisasi belanja terutama masih dalam bentuk belanja pegawai dengan belanja modal yang masih rendah<sup>3</sup>.

Penetapan otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal keuangan karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah kabupaten/kota. Kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum maksimal. Terlihat pada berita harian Kompas tanggal 13 Maret 2012 dijelaskan bahwa sebanyak 63 Pemerintah daerah belum menyelesaikan APBD 2012. Padahal batas waktu penyerahan tanggal 20 Maret 2012. Bagi yang melewati batas waktu, akan dikenai sanksi berupa penundaan 25% alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per bulan. DAU yang tertunda akan dicairkan setelah pemerintah daerah menyelesaikan dan menyerahkan APBD ke Kementerian Keuangan.<sup>4</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah juga dihadapkan pada tantangan yang berat baik pada posisi penerimaan maupun pengeluaran dan pembiayaan. Namun APBD justru diharapkan mampu berperan dalam menciptakan stimulasi fiskal bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat. Hal ini harus diimbangi pula dengan belanja pemerintah daerah yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Pesatnya pembangunan daerah yang berhubungan dengan kegiatan fiskal akan mengakibatkan pos belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang terdiri

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah Triwulan III-2011*

<sup>4</sup> Las. "63 Pemda belum selesaikan APBD". *Kompas*. 13 Maret 2012.

dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan dana yang besar untuk pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut. Dengan pengeluaran yang semakin meningkat, maka akan membutuhkan dana yang besar pula agar semua kebutuhan pemerintah daerah terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah tersebut diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja pemerintah daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Di Jawa Tengah setiap tahun belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Padahal belanja langsung perannya lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Dalam laporan realisasi APBD, dapat kita lihat realisasi belanja daerah Jawa Tengah di bawah ini:

**Tabel I.2**  
**Jumlah Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Presentase</b>
1	2007	3,016,826,562,000	-
2	2008	4,104,562,434,000	36,06%
3	2009	5,200,113,113,000	26,69%
4	2010	4,852,025,591,000	-6,69%
5	2011	5,855,192,391,000	20,67%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djkd.depdagri.go.id>

Realisasi belanja daerah Jawa Tengah yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat gambaran pertumbuhan belanja daerah di Jawa Tengah. Setiap tahunnya pengeluaran daerah berfluktuasi.

Faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dilalokasikan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah. Pemanfaatan DAK salah satunya diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Maka dari itu, dengan adanya pengalokasian DAK dapat mempengaruhi belanja daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh, akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi dapat mengelola sumber daya yang ada dan bisa menciptakan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi ditandai dengan produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tercipta kesejahteraan pada masyarakat. Nyatanya yang terjadi pada Pemerintah Daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang realisasinya dapat dilakukan dengan tingkat belanja daerah.

**Tabel I.3**  
**Perbandingan Dana Alokasi Umum di Jawa Tahun 2007-2011 Rp (000)**

<b>Tahun</b>	<b>Jakarta</b>	<b>Banten</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>D.I.Y</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Timur</b>
2007	119.943	330.597	933.436	437.379	1.050.732	1.091.155
2008	-	342.743	904.358	511.733	1.053.492	1.022.861
2009	-	361.295	984.297	523.920	1.130.743	1.118.478
2010	-	381.979	1.086.124	527.471	1.168.788	1.212.935
2011	209.900	460.384	1.181.553	620.812	1.168.788	1.347.502

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djkd.depdagri.go.id>

Perbandingan Dana Alokasi Umum di Jawa, memang Jawa Tengah yang paling tinggi mendapatkan DAU dari pusat. Untuk tahun terakhir yang paling banyak mendapatkan DAU adalah Jawa Timur, sedangkan Jawa Tengah mendapatkan DAU paling tinggi ketiga dibanding 3 wilayah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan cukup besar terhadap proses pembangunan daerah, kerana PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan dan kontribusi PAD, memacu pemerintah daerah untuk menggali kekayaan daerah guna meningkatkan PAD. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki PAD paling rendah dibandingkan dengan 5 Provinsi lain di Pulau Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djkd.depdagri.go.id>

### **Gambar I.1**

#### **Perkembangan pendapatan asli daerah Jawa Tengah 2007-2011**

Besarnya PAD Jawa Tengah yang semakin meningkat dari tahun 2007-2010. Hal ini cukup ideal dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang. Tetapi pada tahun 2011 PAD Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 12,60%. Peran pendapatan asli daerah saat ini di beberapa daerah masih sangat kecil. Sebagian besar daerah masih tergantung oleh bantuan dana dari pemerintah pusat. Di Jawa Tengah terlihat nilai dari pendapatan asli daerah itu sendiri sudah cukup besar. Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengahpun tidak menutup kemungkinan merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam membiayai kegiatan provinsi. Berikut kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Jawa Tengah pada tahun 2007-2011:

**Tabel I.4**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Kontribusi</b>
2007	2.947.863.606.000	3.016.826.562.000	97.71%
2008	3.698.843.476.000	4.104.562.434.000	90.12%
2009	4.000.735.711.000	5.200.113.113.000	76.94%
2010	4.785.133.225.000	4.852.025.591.000	98.62%
2011	4.182.627.057.000	5.855.192.391.000	71.43%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djkd.depdagri.go.id>

Kontribusi pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah pada tahun 2011 sudah cukup berperan, kontribusi lebih dari 50%. Maupun pada 5 tahun terakhir, pendapatan asli daerah tersebut masih berfluktuasi. Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat kecil, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan asli daerah itu sendiri.

Berlakunya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini, sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pemerintah pusat masih memiliki proporsi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dalam di APBD, dimana sekitar dua per tiga dari total pengeluaran daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat. Pembiayaan dari pemerintah pusat salah satunya adalah DAU. DAU merupakan transfer dari pemerintah pusat yang terbesar, yaitu sekitar 75%.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djkd.depdagri.go.id>

**Gambar I.2**  
**Perkembangan dana alokasi umum Jawa Tengah 2007-2011**

Realisasi dana alokasi umum daerah Jawa Tengah pada grafik di atas, tiap tahun mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2011, karena DAU tahun 2011 sama dengan DAU tahun 2010 yaitu sebesar Rp 1.168.787.757.000,-. Alokasi dana alokasi umum tersebut ditransfer sesuai potensi fiskal dan kebutuhan fiskal setiap daerah. Jika potensi fiskal kebutuhan daerah tersebut kecil, dan kebutuhan fiskalnya besar, maka akan mendapatkan dana alokasi umum besar pula. Kemudian sebaliknya.

Pemerintah daerah tidak dapat memnuhi kebutuhan daerahnya hanya dengan pendapatan asli daerahnya saja, perlu ada bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Terlihat pada grafik pendapatan asli daerah sebelumnya,

bahwa pendapatan asli daerah berfluktuasi, tetapi dana alokasi umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu, kontribusi dana alokasi umum dalam memenuhi kebutuhan daerah dirasa cukup penting. Berikut tabel kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tahun 2007-2011 di Jawa Tengah.

**Tabel I.5**  
**Kontribusi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Kontribusi</b>
2007	1,050,732,000,000	3,016,826,562,000	34.83%
2008	1,053,491,871,000	4,104,562,434,000	25.67%
2009	1,130,742,601,000	5,200,113,113,000	21.74%
2010	1,168,787,757,000	4,852,025,591,000	24.09%
2011	1,168,787,757,000	5,855,192,391,000	19.96%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan <http://djk.d.depdagri.go.id>

Tabel I.4 dan tabel I.3, menunjukkan kontribusi Jawa Tengah dalam membiayai belanja daerahnya sebagian besar yang berperan adalah Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang paling besar pada tahun 2010, yaitu sebesar 98,62%. Untuk dana dari pemerintah pusat yang berupa dana alokasi umum, kontribusi terbesar pada tahun 2007, yaitu sebesar 34,83%.

Pembangunan yang semakin meningkat di daerah, terutama di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan meningkatkan pula pengeluaran (belanja) daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut. Untuk tercapainya kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah daerah memiliki pendapatan berupa PAD dan DAU. Peranan PAD dalam membiayai suatu kegiatan daerah masih sangat kecil. Pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana dari pemerintah pusat berupa DAU.

Provinsi Jawa Tengah tempat penelitian dilakukan merupakan salah satu gambaran provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan daerah yang rendah. Selain itu total belanja daerah yang berfluktuasi pada 5 tahun terakhir dan lebih meningkatkan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Tingkat pendapatan asli daerah serta dana alokasi umum di Provinsi Jawa Tengah juga berfluktuasi 5 tahun terakhir ini. Maka dari itu, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum merupakan masalah umum yang dialami Provinsi ini. Berdasarkan data dan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan yang berkaitan dengan belanja daerah yakni berfluktuasinya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sehingga mempengaruhi rendahnya belanja daerah. Karena pentingnya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan uraian dan aspek diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tinggi rendahnya belanja daerah juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, ternyata masalah belanja daerah yang tinggi memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana dan waktu, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?

16

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah serta berguna untuk menambah referensi dan hasanah ilmu tentang pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan hubungannya dengan belanja daerah di Jawa Tengah sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan Ilmu Pengetahuan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan dalam pengembangan keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah, dana lokasi umum, dan belanja daerah serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.